

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengangguran diartikan sebagai keadaan masyarakat yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak ada pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan dan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan termasuk sebagai pengangguran. Adapun dasar penelitian ini seperti yang dijelaskan dalam teori Keynes, yang menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh rendahnya permintaan umum secara keseluruhan yang disebabkan menurunnya pendapatan, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel yang menyebabkan produksi menurun dan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang menimbulkan pengangguran. Rendahnya pendapatan masyarakat dapat menunjukkan rendahnya nilai indeks pembangunan yang mengukur kualitas manusia, sehingga produktivitas yang rendah yang ditandai dengan menurunnya nilai indeks pembangunan manusia sehingga tidak dibutuhkan oleh perusahaan dan mengakibatkan pengangguran terjadi. Kondisi yang tidak baik seperti ini mengakibatkan perusahaan akan menurunkan jumlah investasi modal yang dikeluarkan yang tentu saja menghambat jalannya industri dan tidak terbukanya lapangan pekerjaan yang baru sehingga akan selalu muncul masalah pengangguran (Suhendra & Wicaksono, 2016).

Tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten dengan membandingkan di wilayah sekitar di Pulau Jawa selama tahun 2015-2019 bahkan selama 4 tahun terakhir Provinsi Banten menempati posisi pertama pada tingkat nasional pengangguran. Provinsi Banten yang memiliki kualitas produktivitas manusia yang diukur berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selama tahun 2015-2019 menempati posisi tertinggi ketiga jika dibandingkan dengan wilayah sekitar di Pulau Jawa. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ini beriringan bersama besarnya upah minimum yang selalu meningkat dan diharapkan dapat membuat tenaga kerja menjadi lebih produktif sehingga masyarakat yang ada di Provinsi Banten dapat memiliki taraf hidup yang layak serta menarik masyarakat menjadi lebih giat dalam mencari pekerjaan, selain itu

investasi yang berada di Provinsi Banten juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang tinggi, dimana dengan tingkat investasi yang tinggi akan menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum bekerja dan akan menurunkan jumlah pengangguran yang ada.

Provinsi Banten merupakan wilayah Provinsi terkecil urutan ke lima se Indonesia dan dianggap layak menjadi contoh pembangunan kawasan industri di daerah lainnya. Hal ini juga di dukung dengan meningkatnya tingkat indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya aspek-aspek ekonomi yang berada di Provinsi Banten tetap menjadikan Provinsi Banten tidak sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Banten yang dinilai lambat dimana penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Banten rata-rata sebesar 0.48% pertahunnya, sedangkan peningkatan nilai indeks pembangunan manusia rata-rata sebesar 0.76% pertahunnya. Fenomena ini juga terjadi pada peningkatan tingkat upah minimum dan investasi, dimana tingkat upah minimum di Provinsi Banten rata-rata sebesar 9.12% dan peningkatan tingkat investasi rata-rata sebesar 7.88% setiap tahunnya maka dapat dijelaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan tingkat indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi yang berada pada Provinsi Banten selama lima tahun terakhir.

Tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia pada Pulau Jawa berada pada Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusianya sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang datang berasal dari Pulau Jawa ataupun luar wilayah Provinsi Banten yang mencari pekerjaan di Provinsi Banten dan juga karena banyaknya praktik percaloan yang menjamin akan bekerja di perusahaan sehingga banyak tenaga kerja lokal menjadi kalah bersaing (Fitriyyah & Nabilla, 2020). Provinsi Banten yang memiliki jumlah masing-masing 4 Kabupaten dan Kota. Setiap kabupaten dan kota dalam Provinsi Banten tersebut memiliki tingkat pengangguran yang berbeda-beda seperti yang terlihat pada tabel 1:

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	10,22	8,3	9,67	8,33	8,71
Kab Lebak	10,74	8,88	8,88	7,69	8,05
Kab Serang	14,8	13	13	12,77	10,65
Kota Cilegon	12	11,8	11,88	9,33	9,68
Kota Tangerang Selatan	6,13	6,83	6,83	4,67	4,79
Provinsi Banten	9,55	8,92	9,28	8,52	8,11

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017-2019

Dilihat dari tabel diatas, bahwa selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan jumlah pengangguran yang berada di Provinsi Banten dimana jumlah pengangguran pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 0.36% dimana tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada 2016 sebesar 8.92% menjadi 9.28% pada tahun 2017. Pada Provinsi Banten jumlah pengangguran terbesar yang berada di tahun 2019 berada di Kabupaten Serang sebesar 10.65% dan kenaikan pengangguran tertinggi ada pada Kabupaten Lebak sebesar 0.36% dimana pada tahun 2019 menjadi 8.05% yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 7.69%, lalu peningkatan tingkat pengangguran terbesar berada pada Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 0.7% dimana jumlah pengangguran yang terjadi di tahun 2016 tingkat pengangguran sebesar 6.83% yang pada tahun sebelumnya 2015 sebesar 6.13%. Salah satu penyebab naiknya tingkat pengangguran di tahun 2019 yaitu terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan perusahaan melakukan PHK masal sehingga tenaga kerja yang sudah mempunyai pekerjaan menjadi tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini diperburuk dengan rendahnya tingkat kualitas manusia yang ada di Provinsi Banten yang menyebabkan kalahnya persaingan tenaga kerja yang datang dari luar wilayah Provinsi Banten sehingga meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

Keberhasilan dalam mencapai peningkatan kualitas manusia bisa diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator yang menandakan tercapainya kenaikan di bidang ekonomi, pendidikan serta kesehatan. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Provinsi Banten yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir yang merupakan perkembangan yang meningkat pemerintah Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2:

Muhammad Diaz Danindra, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN TAHUN 2015-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan S1
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tabel 2. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2019

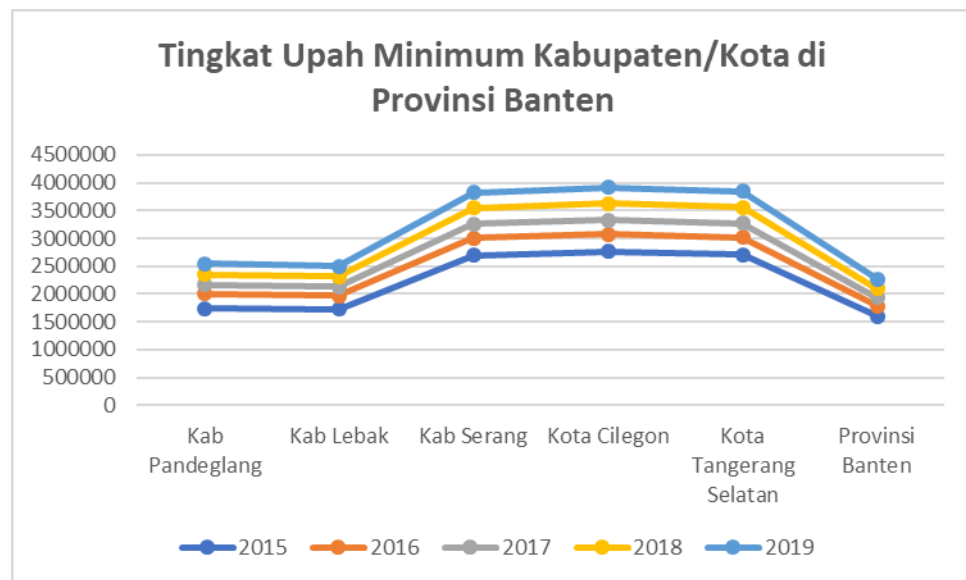
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	62,72	63,4	63,82	64,34	64,91
Kab Lebak	62,03	62,78	62,95	63,37	63,88
Kab Serang	64,61	65,12	65,6	65,93	66,38
Kota Cilegon	71,81	72,04	72,29	72,65	73,01
Kota Tangerang Selatan	79,38	80,11	80,84	81,17	81,48
Provinsi Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017-2019

Dilihat dari tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Banten pada tahun 2015-2019 cenderung terjadi peningkatan dengan IPM yang terjadi di tahun 2019 berada pada Kabupaten Lebak sebesar 63.88 diikuti dengan Kabupaten Pandeglang sebesar 64.91 serta kenaikan IPM tertinggi pada tahun 2019 berada pada Kabupaten Serang sebesar 1.55 dengan tingkat IPM sebesar 66.38 pada tahun 2019. Meningkatnya tingkat indeks pembangunan manusia pada Provinsi Banten sebesar 0.46 di tahun 2017 tetapi tingkat pengangguran mengalami peningkatan di tahun yang sama pada Provinsi Banten sebesar 0.36% sehingga bertentangan dengan teori yang dijelaskan oleh Todaro yang menjelaskan bahwa rendahnya indeks pembangunan manusia berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran. Adapun hubungan indeks pembangunan manusia dengan jumlah tingkat pengangguran yaitu peningkatan kualitas manusia yang merupakan bagian dari proses pembangunan ekonomi. Keberhasilan peningkatan kualitas manusia bisa diukur berdasarkan masalah yang bisa teratasi terutama permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia yaitu pendidikan yang tidak tuntas, kemiskinan, pengangguran dan keberhasilan pembangunan kualitas manusia dari bidang ekonomi. Pencapaian tujuan pembangunan kualitas manusia yang digambarkan melalui tingkat indeks pembangunan manusia tentu sangat mengandalkan peran pemerintah yang berperan sebagai penyedia utama fasilitas pembangunan manusia. Peningkatan kualitas manusia yang ada tentu saja akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja dikarenakan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi. Kegiatan seseorang dengan memilih tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan kegiatan investasi sekaligus biaya peluang (pilihan terbaik) dimana seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan bisa memiliki kesejahteraan yang lebih besar sebagai imbalan yang akan diterimanya (Juliannisa

& Siswantini, 2019). Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfredo Y. M. dkk yang meneliti tentang faktor pengangguran dengan hasil penelitian indeks pembangua manusia memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidupnya maupun keluarganya maka tenaga kerja sangat mengandalkan jumlah upah yang diberikan oleh perusahaan sebagai tenaga kerja yang bekerja. Tingginya tingkat upah yang ada menyebabkan besarnya biaya yang akan dihabiskan perusahaan yang menyebabkan terjadinya pengurangan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Perkembangan upah minimum di Provinsi Banten tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan (Kuntiarti, 2018).



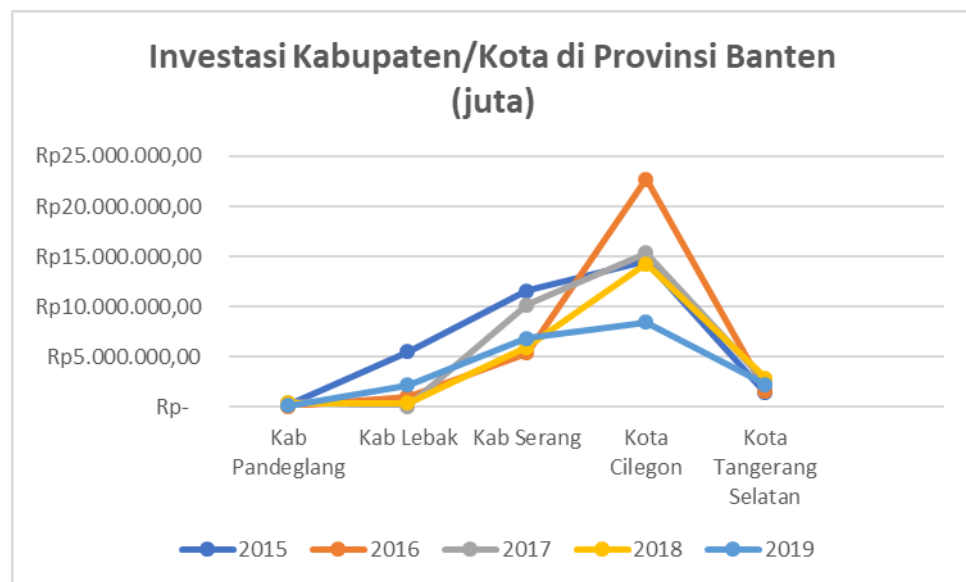
Sumber : Badan Pusat Statistik 2015-2019

Gambar 1. Tingkat Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2015-2019

Upah minimum yang berada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten di tahun 2015-2019 mengalami kenaikan secara signifikan. Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang mempunyai jumlah upah minimum tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar sebesar Rp 3.913.078 yang ada di Kota Cilegon dan selanjutnya sebesar Rp 3.841.368 yang ada di Kota Tangerang Selatan. Meningkatnya upah Provinsi Banten pada tahun 2017 sebesar 8.25% tetapi kenaikan ini juga bersamaan dengan meningkatnya tingkat pengangguran pada

tahun 2017 sebesar 0.36% sehingga tidak sejalan dengan teori keyness yang menjelaskan dengan semakin tinggi upah suatu daerah maka dapat menurunkan jumlah pengangguran. Penetapan jumlah upah yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja menyebabkan pengaruh tingginya tingkat pengangguran yang terjadi. Sehingga jumlah upah yang besar yang harus dibayarkan perusahaan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di suatu wilayah (Aruan & Luther, 2014). Fenomena ini didukung penelitian oleh Yarlina Yacoub dan Maulidia Firdayanti yang membahas tentang pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat memiliki hasil penelitian dengan upah minimum berpengaruh terhadap pengangguran.

Permasalahan pengangguran juga berhubungan dengan tingkat investasi, hal yang dapat mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan mendorong tingkat investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Semacam mendorong tumbuhnya bisnis ataupun pendirian pabrik, serta adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk produksi ataupun permesinan serta menghasilkan lapangan pekerjaan. Tingkat investasi di Provinsi Banten mengalami fluktuatif dapat dilihat pada gambar 2:



Sumber : Badan Pusat Statistik 2015-2019

Gambar 2. Tingkat Investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2015-2019

Tingkat investasi pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif yang cenderung menurun dimana penurunan

tingkat investasi secara signifikan berada pada Kota Cilegon pada tahun 2017-2019, dimana pada tahun 2018 tingkat investasi menurun sebesar Rp 1.081.152,67 dan penurunan tingkat investasi terbesar berada di Kota Cilegon pada tahun 2017 sebesar Rp 7.333.165,84. Penurunan jumlah investasi di Provinsi Banten sebesar Rp 7.791.974,09 atau sebesar 13.79% di tahun 2019 tetapi penurunan tersebut diikuti dengan menurunnya jumlah tingkat pengangguran yang berada di Provinsi Banten pada tahun 2019 sebesar 0.41% sehingga bertentangan dengan teori keyness yang menjelaskan dimana semakin tinggi tingkat investasi dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada begitu pula semakin menurunnya jumlah investasi semakin sedikit tenaga kerja yang terserap. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya perusahaan yang tutup dan berpindah tempat dari Provinsi Banten ke luar daerah dengan tujuan untuk menghindari upah minimum yang dirasa terlalu tinggi pada Provinsi Banten. Hal ini salah satu yang menyebabkan kurangnya tertarik bagi investor yang dapat menanamkan modalnya di Provinsi Banten. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahanatha Giri Prayudia dan Made Henny Urmila Dewi yang mendapatkan hasil bahwa investasi memiliki pengaruh dengan jumlah pengangguran yang berada pada Provinsi Bali.

Investasi yaitu pemberian sejumlah modal pada waktu berjalan dengan asumsi akan mendapatkan keuntungan pada waktu dikemudian hari. Investasi yang banyak pada saat ini merupakan investasi padat modal sehingga pengamat menyimpulkan bahwa pengangguran terjadi karena berkurangnya investasi padat karya. Salah satu permasalahan yang paling penting dalam negara Indonesia yaitu pengangguran. Pemerintah meyakini dengan banyaknya investasi yang menanam modal di Indonesia maka akan dapat mengurangi pengangguran dengan membangun pabrik-pabrik yang baru sehingga adanya lapangan pekerjaan yang luas (Rahadi & Yuliarmi, 2014).

Permasalahan yang paling penting yang harus diselesaikan dalam perekonomian yaitu pengangguran, karena dengan adanya pengangguran akan menyebabkan dampak negatif yang timbul. Secara ekonomis pengangguran menyebabkan turunnya pendapatan negara dan turunnya jumlah penduduk dan tentu saja menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Seperti yang terjadi pada Provinsi Banten mengalami penurunan pendapatan pada tahun

2019 menjadi Rp11.20 triliun yang hanya 95% terealisasi dari target pendapatan Provinsi Banten, hal ini juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten yang mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 5.53% dimana pada tahun 2018 sebesar 5.82%. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Provinsi Banten maka dapat dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2015-2019”.

I.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang selalu terjadi pada negara berkembang yaitu permasalahan pengangguran tidak terkecuali yang terjadi di Indonesia dengan jumlah pengangguran yang. Untuk melihat tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan perekonomian daerah dapat dilihat melalui tingginya jumlah pemngangguran yang ada pada daerah tersebut. Tingginya jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Banten masih dikatakan tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi menjadi penghambat bagi perekonomian di Provinsi Banten itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran?
3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Pengangguran?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran di Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Banten.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bisa menjadi wawasan dan manfaat secara teoritis ataupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan menjadi pengetahuan kepada pembaca ataupun penulis yang membahas pentingnya pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi terhadap pengangguran.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa membuat pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi terhadap pengangguran.